



KATALOG REFERENSI POLITIK DAN KOMUNIKASI

BAPPENAS

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------|------------|
| DAFTAR ISI | ii |
| KATALOG DALAM TERBITAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| Kelembagaan Demokrasi | 1 |
| Buku | 2 |
| Laporan | 12 |
| Ringkasan Kajian | 33 |
| Wawasan Kebangsaan | 36 |
| Jurnal | 37 |
| Laporan | 49 |
| Ringkasan Kajian | 66 |
| Komunikasi | 68 |
| Buku | 69 |
| Laporan | 72 |
| Naskah | 90 |

KATALOG DALAM TERBITAN

| | |
|--------------|---|
| Judul Buku | : Katalog Referensi Sektor Politik dan Komunikasi |
| Pengarah | : 1. Mohammad Irfan Saleh 2. Randy Rizang Wrihatnolo 3. Suhartatik 4. Retno Amarwati 5. Suharna |
| Penulis | : 1. Amalia Nur Hasanah 2. Damar Nastiti Dananjaya 3. Fara Nadhifatuz Zulfa 4. Hutomo Pangestu 5. Madinar 6. Muhammad Eka Kusuma 7. Rakha Naufal Ferdiansyah 8. Titan Andriansyah 9. Very Yanto 10. Yasinta Kurnia Kusumaningrum |
| Desain | : Hutomo Pangestu |
| Penerbit | : Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) |
| Halaman | : 135 |
| Tahun Terbit | : 2021 |
| Ukuran | : 14,8 cm x 21 cm |

KATA PENGANTAR

Informasi dan pengetahuan merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi atau lembaga. Pengetahuan adalah informasi yang mengubah sesuatu atau seseorang, karena informasi menjadi dasar untuk bertindak. Mengingat pentingnya informasi dan pengetahuan, serta banyaknya informasi dan pengetahuan yang tercipta di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang belum terkelola dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas yang salah satu tugas dan fungsi Pusdatinrenbang adalah pengelolaan informasi dan pengetahuan. Maka dari itu kami mencoba mengumpulkan referensi baik berupa jurnal, kajian, laporan, dan sebagainya terkait sektor Politik dan Komunikasi yang merupakan salah satu sektor di Kementerian PPN/Bappenas dan disusun sebagai katalog referensi. Katalog referensi ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi unit kerja dalam membuat/menyusun kajian/laporan atau *policy paper* dan sebagainya.

Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim yang berkontribusi dan memberikan ide-ide sehingga terwujudnya penyusunan katalog referensi. Tentunya katalog referensi yang kami susun, masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan katalog referensi ini

Jakarta, Mei 2021
Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Renbang
Kementerian PPN/Bappenas

Mohammad Irfan Saleh



KELEMBAGAAN DEMOKRASI

The image features a complex network of white nodes and connecting lines on a light beige background. The nodes are arranged in a roughly circular pattern, with some lines crossing each other. The word "BUKU" is written in a bold, red, sans-serif font in the center of the network. The entire scene is set against a dark red background with rounded corners.

BUKU

Indeks Demokrasi Indonesia 2009, Menakar Demokrasi di Indonesia

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 321.8 |
| Kode Klasifikasi DDC | 321.8.MAS.i |
| Penerbit | United Nations Development Programme, Indonesia |
| Pengarang | Maswadi Rauf Syarif Hidayat dkk |
| Tahun Terbit | 2011 |
| Tipe File | Buku |
| Deskripsi | Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2009 ini dinahkodai oleh Bappenas, dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), dan pemerintah provinsi, serta melibatkan organisasi masyarakat sipil dan akademisi dari seluruh Indonesia dalam prosesnya untuk memperkaya hasil laporan ini. IDI 2009 berupaya mengukur kondisi demokrasi Indonesia pada tahun 2009 melalui tiga aspek penting: Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. IDI menyajikan gambaran kondisi demokrasi masing-masing provinsi berdasarkan indikator-indikator yang dikembangkan dari tiga aspek tersebut. |

Indeks Demokrasi Indonesia 2010, Kebebasan yang Bertanggungjawab dan Substansial: Sebuah Tantangan

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 321.8 |
| Kode Klasifikasi DDC | 321.8.MAS.i |
| Penerbit | Badan Pusat Statistik |
| Pengarang | Maswadi Rauf Syarif Hidayat dkk |
| Tahun Terbit | 2012 |
| Tipe File | Buku |
| Deskripsi | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan country-led assessment yang dibangun atas fondasi kepemilikan nasional dan dapat membantu Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik. IDI 2009 telah menjadi benchmark dalam penyusunan indeks berikutnya. Oleh karena itu, aspek, variabel dan indikator yang digunakan dalam IDI 2010 ini sama persis (apple to apple) dengan IDI 2009. Dengan demikian, hasil kedua indeks yang disusun secara serial ini dapat diperbandingkan –baik pada tingkat aspek, variabel, indikator, maupun indeks secara keseluruhan. |

Indeks Demokrasi Indonesia 2011, Demokrasi Indonesia: Ledakan Tuntutan Publik vs Inersia Politik

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 321.8 |
| Kode Klasifikasi DDC | 321.8.MAS.i |
| Penerbit | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Badan Pusat Statistik |
| Pengarang | Maswadi Rauf Syarif Hidayat dkk |
| Tahun Terbit | 2013 |
| Tipe File | Buku |
| Deskripsi | Buku ini adalah publikasi ketiga laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) setelah sebelumnya laporan IDI 2009 dan 2010 diluncurkan. Karena IDI 2009 adalah benchmark dalam penyusunan indeks, maka IDI 2010 dan 2011 menggunakan aspek, variabel, dan indikator yang sama persis (apple to apple) dengan IDI 2009. Sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, IDI dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi pada tingkat provinsi, sehingga keadaan demokrasi dapat digambarkan dengan jelas. |

Indeks Demokrasi Indonesia 2012, Diskrepansi Antara Tuntutan dan Perilaku Demokrasi

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 321.8 |
| Kode Klasifikasi DDC | 321.8.MAS.i |
| Penerbit | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Badan Pusat Statistik |
| Pengarang | Maswadi Rauf Syarif Hidayat dkk |
| Tahun Terbit | 2014 |
| Tipe File | Buku |
| Deskripsi | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2012 merupakan edisi ke empat sejak IDI 2009. Setiap tahun, IDI mampu mengindikasikan dinamika kehidupan demokrasi di semua komponen bangsa, mulai dari pejabat penyelenggara pemerintahan di daerah, wakil rakyat di DPRD Provinsi, partai politik, institusi peradilan dan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi. IDI 2012 dengan tema “Diskrepansi antara Tuntutan dan Perilaku Demokrasi” memberikan gambaran perilaku berdemokrasi antar komponen bangsa yang terjadi sepanjang tahun 2012. |

Indeks Demokrasi Indonesia 2013, Tantangan Konsolidasi Demokrasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adab Berdemokrasi

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 321.8 |
| Kode Klasifikasi DDC | 321.8.MAS.i |
| Penerbit | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Badan Pusat Statistik |
| Pengarang | Maswadi Rauf Syarif Hidayat dkk |
| Tahun Terbit | 2014 |
| Tipe File | Buku |
| Deskripsi | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bersifat country specific, dimana capaian indeks demokrasi di tiap-tiap provinsi diakumulasi dan dijadikan dasar dalam menilai kehidupan demokrasi tingkat nasional. IDI mengandalkan pada data empiris untuk mengukur perilaku berdemokrasi pemerintah dan masyarakat, sehingga IDI 2013 mencatat peristiwa dan perilaku berdemokrasi sepanjang 2013. Laporan IDI 2013 dengan judul “Tantangan Konsolidasi Demokrasi: Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Adab Berdemokrasi” merupakan potret perilaku berdemokrasi selama periode 2013. |

Indeks Demokrasi Indonesia 2014, Ketimpangan Antara Institusi dan Kultur Demokrasi

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 321.8 |
| Kode Klasifikasi DDC | 321.8.MAS.i |
| Penerbit | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Badan Pusat Statistik |
| Pengarang | Maswadi Rauf Syarif Hidayat dkk |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Tipe File | Buku |
| Deskripsi | Tinggi rendahnya nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di suatu wilayah merupakan tanggung jawab semua pihak, karena IDI merupakan indeks komposit yang mengukur perilaku demokrasi dari empat unsur, yaitu: eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat luas. Buku IDI 2014 adalah hasil asesmen terhadap kondisi demokrasi provinsi di seluruh Indonesia pada Tahun 2014. Tahun 2014 merupakan tahun istimewa sepanjang pengukuran IDI karena bertepatan dengan pemilihan umum, sehingga pada tahun ini skor indikator-indikator yang terkait mengalami perubahan, dimana skor indikator-indikator terkait Pemilu meningkat signifikan. |

Indeks Demokrasi Indonesia 2015, Urgensi Penguatan Kultur Demokrasi

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 321.8 |
| Kode Klasifikasi DDC | 321.8.MAS.i |
| Penerbit | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan |
| Pengarang | Maswadi Rauf Syarif Hidayat dkk |
| Tahun Terbit | 2016 |
| Tipe File | Buku |
| Deskripsi | Seiring berjalannya waktu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) semakin diakui manfaatnya secara nasional dan dikenal oleh dunia internasional sebagai instrumen yang solid untuk mengukur perkembangan demokrasi, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi dapat direplikasikan negara-negara lain dalam mengukur perkembangan demokrasinya. IDI yang berbasis provinsi ini merupakan produk ingenuity untuk mengukur demokrasi khas Indonesia dengan tidak mengabaikan nilai-nilai universal demokrasi. IDI 2015 menggambarkan perilaku berdemokrasi antar komponen bangsa Indonesia yang terjadi di sepanjang tahun 2015. |

Indeks Demokrasi Indonesia 2016, Tantangan Peningkatan Kualitas Partisipasi dan Representasi

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 321.8 |
| Kode Klasifikasi DDC | 321.8.MAS.i |
| Penerbit | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan |
| Pengarang | Maswadi Rauf Syarif Hidayat dkk |
| Tahun Terbit | 2017 |
| Tipe File | Buku |
| Deskripsi | Buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 dengan judul "Tantangan Peningkatan Kualitas Partisipasi dan Representasi" ini merupakan publikasi kedelapan sejak pertama kali diterbitkan pada Tahun 2009 dan merupakan penerbitan ketiga pada masa Kabinet Kerja 2014-2019. Setiap tahun IDI mampu mengindikasikan dinamika kehidupan demokrasi di semua komponen bangsa: pejabat penyelenggara pemerintahan di daerah, wakil rakyat di DPRD Provinsi, partai politik, institusi peradilan dan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi. |

Indeks Demokrasi Indonesia 2017, Citra Demokrasi, Minim Kapasitas

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 321.8 |
| Kode Klasifikasi DDC | 321.8.MAS.i |
| Penerbit | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan |
| Pengarang | Maswadi Rauf Syarif Hidayat dkk |
| Tahun Terbit | - |
| Tipe File | Buku |
| Deskripsi | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Laporan IDI 2017 ini terutama melaporkan kondisi demokrasi provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2017 sebagaimana tercermin pada capaian IDI provinsi-provinsi tersebut. Selain kondisi tahun 2017, tentunya akan digambarkan pula pola, dinamika, dan tren capaian IDI selama beberapa tahun. |



LAPORAN

Background Study Bidang Politik dan Komunikasi untuk Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019)

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 352.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.3.DIR.b |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Sub Bidang Politik Luar Negeri. Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Sub Bidang Politik Luar Negeri. Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2013 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Laporan ini akan menyetujui review terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam masa dua periode RPJMN, tantangan yang akan dihadapi pada masa 2015-2019, dan rekomendasi kebijakan sebagai respon dan antisipasi penyelesaian tantangan tersebut. Hasil dari pembahasan ini akan dimodifikasi ke dalam sintesa sebagai bagian dari <i>Background Study</i> RPJMN 2015-2019 Bidang Politik dan Komunikasi. |

Background Study Bidang Politik dan Komunikasi untuk Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019)

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 352.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.3.DIR.b |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Sub Bidang Komunikasi dan Informasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Sub Bidang Komunikasi dan Informasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2013 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Laporan <i>background study</i> yang berisi analisis kinerja pencapaian program yang dilaksanakan oleh mitra K/L Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, serta identifikasi isu-isu strategis yang berkembang dalam dinamika pembangunan komunikasi dalam lima tahun ke depan. |

***Background Study* Bidang Politik dan Komunikasi untuk Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019)**

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 352.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.3.DIR.b |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Sub Bidang Komunikasi dan Informasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Sub Bidang Komunikasi dan Informasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2014 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Laporan <i>background study</i> yang berisi analisis kinerja pencapaian program yang dilaksanakan oleh mitra K/L Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, serta identifikasi isu-isu strategis yang berkembang dalam dinamika pembangunan komunikasi dalam lima tahun ke depan. |

Background Study Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sub-Bidang Politik dalam Negeri Efektivitas Forum-Forum Dialog Masyarakat dan Pelaksanaan Program Kebangsaan serta Program Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 352.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.3.DIR.b |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Sub Bidang Politik Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Sub Bidang Politik Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Di Provinsi Lampung, keluhan anggaran dari forum-forum yang ada menjadi tema sentral dari pertemuan forum-forum di Lampung. Namun dalam hubungan koordinasi anggaran di SKPD, Bidang Sosbud di Bappeda Provinsi Lampung secara langsung membawahi Kesbangpol. Dalam prakteknya, Kesbangpol mendapatkan porsi anggaran yang kecil, tapi dalam mekanisme perencanaan anggaran, kuncinya ada di regulasi, yaitu Permendagri dan Undang-Undang. |

Dukungan Pelaksanaan Kerja Sama RI - Amerika Serikat di Bidang Demokrasi (*Democracy & Governance Programs*)

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 327.1 |
| Kode Klasifikasi DDC | 327.1.DIR.d |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2012 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Terkait <i>Comprehensive Partnership</i> Republik Indonesia – Amerika Serikat. |

Fasilitasi Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 327.1 |
| Kode Klasifikasi DDC | 327.1.DIR.f |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2012 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | <p><i>Peace Corps</i> adalah badan independen pemerintah Amerika Serikat yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman bersama antara rakyat Amerika dan masyarakat dunia lainnya. Indonesia mengharapkan kerjasama <i>Peace Corps</i> dilandasi prinsip yang menekankan kesetaraan posisi dan manfaat yang diperoleh. Dari segi kesetaraan posisi, kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana telah dicantumkan dalam <i>Paris Declaration</i> dan <i>The Jakarta Commitment</i>. Dari aspek manfaat, selayaknya kedua belah pihak memperoleh manfaat yang bersifat resiprokal.</p> |

Hibah USAID- DEMOCRATIC GOVERNANCE (USAID GRANT AGREEMENT NO. 497-026)

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 321.8 |
| Kode Klasifikasi DDC | 321.8.DIR.h |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2012 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Latar belakang penyusunan laporan adalah untuk monitoring dan evaluasi atas bantuan USAID yang diperuntukkan bagi penguatan, demokratisasi, reformasi birokrasi lembaga penegak hukum, performa dan akuntabilitas publik kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah Indonesia. Selain itu hasil laporan diharapkan dapat memberikan gambaran akan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program serta dapat memberikan rekomendasi untuk kemajuan program itu sendiri. |

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 324.6 |
| Kode Klasifikasi DDC | 324.6.FEI.i |
| Penerbit | Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia |
| Pengarang | Feizal Rahman |
| Tahun Terbit | - |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Secara rutin Bawaslu telah melakukan penyusunan IKP sejak Pemilu Legislatif Tahun 2014. Pada proses penyusunan IKP 2017 ini, Bawaslu telah melakukan penyempurnaan konsep dan metode dari IKP sebelumnya. |

Indeks Kerawanan Pemilu 2019

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 324.6 |
| Kode Klasifikasi DDC | 324.6.ILH.i |
| Penerbit | Badam Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia |
| Pengarang | Ilham Yamin |
| Tahun Terbit | - |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | IKP 2019 merupakan penelitian ilmiah yang memerhatikan aspek metodologi, teori, teknik analisis, hingga perumusan kesimpulan dan rekomendasi. Metode yang dipilih dalam riset IKP 2019 adalah penelitian kuantitatif, sehingga riset ini memanfaatkan disiplin studi statistik yang ketat. Hasil data statistik kemudian dianalisis oleh tim peneliti untuk kemudian disajikan dalam satu laporan penelitian. Obyek yang dianalisis yaitu Pilpres dan Pileg 2014, dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada Tahun 2015, 2017, dan 2018. Sedangkan target yang disasar dari penelitian IKP 2019 adalah pemilu serentak 2019. |

Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepada Daerah 2018

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 324.6 |
| Kode Klasifikasi DDC | 324.6.ILH.i |
| Penerbit | Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia |
| Pengarang | Ilham Yamin |
| Tahun Terbit | - |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | IKP Pilkada 2018 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018. Dalam studi IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai berbagai hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis. |

Laporan Akhir Koordinasi Strategis Dalam Rangka Penguatan Demokrasi Indonesia

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 321.8 |
| Kode Klasifikasi DDC | 321.8.DIR.I |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2017 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Dalam rangka Penguatan Demokrasi Indonesia sepanjang Tahun 2017, sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, Direktorat Politik dan Komunikasi perlu melakukan serangkaian koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait, antara lain dengan pemerintahan pusat/daerah, LSM/Tokoh/Masyarakat, Universitas, Swasta, Mitra Pembangunan dan instansi lainnya yang terkait dalam proses perencanaan pembangunan Politik dalam kerangka RPJMN 2015-2019. |

Laporan Akhir Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Bidang Politik dan Komunikasi

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 352.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.3.DIR.I |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2017 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah yang dilakukan Direktorat Politik dan Komunikasi bertujuan untuk penyusunan Program Nasional (mencakup kegiatan prioritas, proyek prioritas) beserta anggarannya serta memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan dicapai di bidang Kelembagaan Politik, Wawasan Kebangsaan dan Komunikasi. |

Laporan Akhir Reviu *Government Public Relations* di Indonesia Tahun 2016

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 352.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.3.DIR.I |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2017 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Reviu Pelaksanaan Kebijakan <i>Government Public Relations</i> (GPR) di Indonesia dilakukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan, permasalahan dan kendala serta dampak kebijakan GPR terhadap masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pendekatan yang dilakukan dengan studi dokumen, observasi lapangan, dan pertemuan dengan stakeholders. |

Laporan Akhir Tinjauan Peran Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 324.2 |
| Kode Klasifikasi DDC | 324.2.DIR.I |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2016 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Penelitian ini berangkat dari rendahnya skor kinerja partai politik dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis mengenai permasalahan pokok yang dihadapi partai politik di era reformasi dengan sebelumnya memberikan latar belakang sejarah mengenai transformasi partai politik di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dan peluang partai politik serta mengidentifikasi berbagai upaya penguatan partai politik untuk menuju konsolidasi demokrasi. |

Laporan Fasilitas Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia Tahun 2016

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 327.1 |
| Kode Klasifikasi DDC | 327.1.DIR.I |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2017 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Tujuan kegiatan ini adalah tersalurkannya fasilitasi Bappenas dalam mendukung koordinasi yang baik di antara instansi pemerintah yang terkait dengan program <i>Peace Corps</i> . Melalui fasilitasi ini, diharapkan program <i>Peace Corps</i> dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan dan bermanfaat. Penerima manfaat dari kegiatan fasilitasi pelaksanaan program <i>Peace Corps</i> adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta para siswa di sekolah dan madrasah yang menjadi lokasi progam <i>Peace Corps</i> |

Laporan Kegiatan Pengendalian Program/Kegiatan Tahun 2016

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 070.43 |
| Kode Klasifikasi DDC | 070.43.DIR.I |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2016 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menjadi dokumen pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Pengendalian bersama sepuluh mitra Direktorat Politik dan Komunikasi. |

Laporan Kegiatan Penguatan Demokrasi Indonesia Tahun 2016

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 321.8 |
| Kode Klasifikasi DDC | 321.8.DIR.I |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | - |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Laporan ini berisikan penguatan demokrasi Indonesia pada tahun 2016. |

Politik Lokal terhadap Efektifitas Pemerintahan Daerah

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 352.14 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.14.KED.p |
| Penerbit | Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2014 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Perubahan sistem politik dalam pengelolaan politik daerah, berdampak dengan munculnya gejala politik lokal. Implementasi politik lokal memunculkan ekses, diantaranya banyak penilaian bahwa dinamika politik lokal seringkali dianggap membahayakan dan cenderung bertindak tidak atas kepentingan masyarakat/rakyat, namun lebih pada kepentingan organisasi, partai, maupun golongan tertentu. |

Review Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 342.07 |
| Kode Klasifikasi DDC | 342.07.DIR.r |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2014 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas sebagai rekan Bawaslu dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi, berinisiatif untuk melakukan review atas pelaksanaan pengawasan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014 yang dilakukan oleh Bawaslu. Meskipun hasil temuan review terhadap program Bawaslu tersebut belum maksimal, namun inisiasi ini dirasa sangat baik sebagai upaya permulaan dari institusi pemerintah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu, sehingga Pemilu bukan saja milik pemerintah melainkan milik bersama. |

Strategi dan Rencana Aksi Nasional Pemanjapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 323.6 |
| Kode Klasifikasi DDC | 323.6.DIR.s |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2017 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Pada akhir tahun 2016, Stranas Pemanjapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa diusulkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dimasukkan dalam daftar program penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Tahun 2017. Direktorat Politik dan Komunikasi terus melakukan upaya penyempurnaan Draft Stranas Wasbang dan Karbang tersebut hingga tahun 2017. |



RINGKASAN KAJIAN

Ringkasan Laporan Akhir Pengembangan Model Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya Berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Proses Demokratisasi (Studi *Democracy Trust Fund*)

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 321.8 |
| Kode Klasifikasi DDC | 321.8.DIR.r |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | - |
| Tipe File | Ringkasan Kajian |
| Deskripsi | Kemajuan sebuah sistem akan terkait dengan implikasi-implikasi yang dapat ditimbulkannya. Keberhasilan demokrasi saat ini, juga disertai dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang muncul sebagai output politik yang bekerja dalam sistem demokrasi seperti rendahnya akuntabilitabilitas publik para legislator, semakin rendahnya partisipasi politik masyarakat, angka korupsi yang memprihatinkan terhadap aparat penyelenggara negara. |

Ringkasan Laporan Akhir Pengembangan Model Kelembagaan dan Dukungan Sumber Daya Berkelanjutan bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Proses Demokratisasi (Studi *Democracy Trust Fund*)

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Kelembagaan Demokrasi |
| Kode Kelas DDC | 321.8 |
| Kode Klasifikasi DDC | 321.8.DIR.r |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | - |
| Tipe File | Ringkasan Kajian |
| Deskripsi | <p>Kemajuan sebuah sistem akan terkait dengan implikasi-implikasi yang dapat ditimbulkannya. Keberhasilan demokrasi saat ini, juga disertai dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang muncul sebagai output politik yang bekerja dalam sistem demokrasi, seperti rendahnya akuntabilitabilitas publik para legislator, semakin rendahnya partisipasi politik masyarakat, angka korupsi yang memprihatinkan terhadap aparat penyelenggara negara. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merupakan salah satu elemen penting lahirnya kehidupan demokrasi dan merupakan salah satu peluang bagi keberlanjutan demokrasi yang lebih terpol. Potensi penting dan strategis ini terlihat tidak tergarap untuk dapat menjadi potensi penting dalam pembangunan konsolidasi demokrasi.</p> |



WAWASAN KEBANGSAAN

A network diagram consisting of numerous small, light-colored circular nodes connected by thin, light-colored lines. The nodes are arranged in a somewhat circular pattern, with some lines crossing each other. The background is a light beige color with rounded corners, set against a dark red background.

JURNAL

Eksistensi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Entikong dalam Upaya Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Perbatasan Entikong Kalimantan Barat dan Warga Indonesia di Tebedu Malaysia

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 323.6 |
| Kode Klasifikasi DDC | 323.6.MAR.e |
| Penerbit | Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura (JPMIS) |
| Pengarang | Marti Netty Herawati Elyta |
| Tahun Terbit | 2014 |
| Tipe File | Jurnal |
| Deskripsi | Pemerintah Indonesia belum mampu mewujudkan implementasi penguatan penyiaran yang signifikan di wilayah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau, yang merupakan salah satu dari 5 wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan Barat. Berbagai alasan dan sebab mengapa wilayah perbatasan ini sangat tertinggal dibandingkan dengan daerah lain, satu diantaranya adalah karena wilayah perbatasan negara hanya dilihat semata-mata sebagai batas wilayah (territory). Di bidang penyiaran, Kecamatan Entikong hanya memiliki satu lembaga penyiaran yang beroperasi yakni LPP RRI yang mulai siaran pada tahun 2008, bandingkan dengan Malaysia yang memiliki 13 stasiun penyiaran radio dan 3 stasiun penyiaran televisi. |

Identifikasi Faktor-Faktor Pembentukan Karakter Mahasiswa

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 323.6 |
| Kode Klasifikasi DDC | 323.6.MON.i |
| Penerbit | Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi (JAS-PT) |
| Pengarang | Monica Mayeni Manurung Rahmadi |
| Tahun Terbit | 2017 |
| Tipe File | Jurnal |
| Deskripsi | Isu menurunnya karakter bangsa merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karakter mahasiswa, sebagai generasi muda bangsa; dapat diidentifikasi dari aspek akademik dan aspek non akademik. Aspek akademik ukurannya dapat dengan mudah diukur melalui prestasi akademik misalnya atau, kejujuran akademik dan sikap ilmiah. Aspek non akademik dapat diukur dari segi perilaku maupun wawasan kebangsaan. Peran perguruan tinggi, pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pembentukan karakter mahasiswa. Budaya, lingkungan akademik dengan semua perangkatnya, |

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pendukung Tumbuh Kembang Wawasan Kebangsaan pada Mata Pelajaran PPKn di SMP Negeri 7 Palembang

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 323.6 |
| Kode Klasifikasi DDC | 323.6.RAH.i |
| Penerbit | Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan (JMKSP) |
| Pengarang | Rahma Daniarti |
| Tahun Terbit | 2017 |
| Tipe File | Jurnal |
| Deskripsi | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Pancasila sebagai nilai-nilai yang mendukung peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan pada mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 7 Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 7 Palembang dengan melibatkan guru dan siswa sebagai objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data diukur melalui teknik triangulasi. |

Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa yang Berbasis pada Lingkungan Sekolah

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 323.6 |
| Kode Klasifikasi DDC | 323.6.M. .i |
| Penerbit | Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Pengarang | M. Abdul Roziq A. |
| Tahun Terbit | 2016 |
| Tipe File | Jurnal |
| Deskripsi | <p>Pembangunan pendidikan nasional disinergikan dan diarahkan secara linear untuk membangun, memelihara, mengembangkan karakter dan wawasan kebangsaan, persatuan nasional, dan solidaritas nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan karakter adalah usaha sadar untuk mendidik peserta didik untuk membuat keputusan by self dan memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan. Dalam pendidikan karakter ditentukan oleh tiga hal: mengetahui, perasaan moral yang moral, dan perilaku moral. Dengan tujuan untuk membangun bangsa yang kuat, kompetitif, moral, berbudi, akhlak mulia baik, toleransi, bekerja sama, semangat patriotik, berkembang dinamis, ilmu pengetahuan dan teknologi harus berorientasi dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.</p> |

Nasionalisme Masyarakat di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat Melayu-Karimun

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 320.54 |
| Kode Klasifikasi DDC | 320.54.CAH.n |
| Penerbit | Jurnal Masyarakat Indonesia |
| Pengarang | Cahyo Pamungkas |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Tipe File | Jurnal |
| Deskripsi | <p>Tulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikan upaya pemeliharaan rasa kebangsaan yang telah dilakukan negara terhadap masyarakat perbatasan. Kedua, mengkaji sejauh mana masyarakat perbatasan mempunyai pengetahuan tentang negara dan perbatasan. Ketiga, melihat sejauh mana masyarakat perbatasan memiliki kebanggaan nasional dan memaknai nasionalisme. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari wawancara, diskusi kelompok terbatas, pengamatan terlibat, dan studi literatur yang dilakukan di Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Batu (Kabupaten Karimun).</p> |

Pandataran dan Jarlatsuh: Model Pendidikan Multikultural di SMA Taruna Nusantara Magelang

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 371.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 371.3.LAI.p |
| Penerbit | Jurnal Komunitas Research and Learning in Sociology and Anthropology |
| Pengarang | Laila Octaviani |
| Tahun Terbit | 2013 |
| Tipe File | Jurnal |
| Deskripsi | Penelitian ini bertujuan untuk membahas model pendidikan multikultural di SMA Taruna Nusantara (TN) Magelang Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. |

Pariwisata dalam Tinjauan Pendidikan: Studi Menuju Era Revolusi Industri

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 910.2 |
| Kode Klasifikasi DDC | 910.2.ERW.p |
| Penerbit | PUSAKA (Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Busines Event) |
| Pengarang | Erwin Akib |
| Tahun Terbit | 2020 |
| Tipe File | Jurnal |
| Deskripsi | Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjabarkan dan menjawab tantangan yang dihadapi -Edu-Tourism di era revolusi industri 4.0. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan, yang difokuskan pada pembuatan proses desisi dan menganalisis hubungan fenomena yang dinamis dengan logis ilmiah. |

Pendidikan Humaniora untuk Mengembangkan Wawasan Kemanusiaan dan Kebangsaan

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 320.54 |
| Kode Klasifikasi DDC | 320.54.ANW.p |
| Penerbit | Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang |
| Pengarang | Anwar Saleh Daulay |
| Tahun Terbit | 2002 |
| Tipe File | Jurnal |
| Deskripsi | Ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, meskipun pada kenyataannya juga menimbulkan kecemasan tertentu. Pendidikan humanistik bersama dengan pendidikan agama dapat melindungi masyarakat dari pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pendidikan humanistik, sekolah akan menghasilkan generasi yang matang sebagai manusia dan warga negara yang baik dari pada sekedar pekerja robotik. Studi yang lebih terencana tentang semua aspek pendidikan perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. |

Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Fungsi Media Massa terhadap Wawasan Kebangsaan

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 323.6 |
| Kode Klasifikasi DDC | 323.6.MET.p |
| Penerbit | Jurnal Kultur Demokrasi |
| Pengarang | Meta Ambarsari Irawan Suntoro Hermi Yanz |
| Tahun Terbit | 2013 |
| Tipe File | Jurnal |
| Deskripsi | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap wawasan kebangsaan dan fungsi media massa terhadap wawasan kebangsaan siswa SMA Kemala Bhayangkari Kabupaten Lampung Utara TA 2012/2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional dengan subjek penelitian siswa kelas XI. Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah 40 siswa. Untuk mengumpulkan data menggunakan teknik angket, yang ditunjang dengan wawancara dan dokumentasi. Data analisis menggunakan rumus Chi kuadrat. |

Peranan Elite Intelektual dalam Dinamika Masyarakat Antara Harapan dan Kenyataan

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 320.05 |
| Kode Klasifikasi DDC | 320.05.BAM.p |
| Penerbit | Humaniora |
| Pengarang | Bambang Dharwiyanto Putro |
| Tahun Terbit | 2000 |
| Tipe File | Jurnal |
| Deskripsi | Merujuk pada pendapat Keller, kaum elite adalah minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggung jawab. Ini artinya efektif melihat pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat golongan elit ini memberikan tanggapannya (Keller, 1995: 3). Sementara itu, Alatas (1988) melihat bahwa orang intelektual adalah orang yang memusatkan diri untuk memikirkan ide dan masalah non-material dengan menggunakan kemampuan penalarannya. |

Wawasan Kebangsaan dalam Bingkai Semangat Postmodernisme

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 320.54 |
| Kode Klasifikasi DDC | 320.54.FAI.w |
| Penerbit | PKn Progresif |
| Pengarang | Faizal Yan Aulia |
| Tahun Terbit | 2012 |
| Tipe File | Jurnal |
| Deskripsi | Dunia sudah mulai keluar dari zaman modern. Dialektika yang masuk ke dalamnya juga sedang dalam transisi menuju perubahan. Jawaban modernisme tidak lagi memuaskan, bahkan menyisakan segudang pertanyaan yang perlu dijawab dengan paradigma baru. Maka dari itu, post-modernisme tampaknya berusaha menjawab tantangan dan hambatan dunia postmodern. Paradigma <i>postmodern</i> mungkin bukan jawaban terbaik dari semua masalah, tetapi sangat membantu dalam menelaah kembali tanggapan-tanggapan yang dianggap sudah usang. |



LAPORAN

***Background Study* Bidang Politik dan Komunikasi untuk Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019)**

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 352.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.3.DIR.b |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Sub Bidang Politik Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Sub Bidang Politik Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2013 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | <i>Background study</i> politik dalam negeri ini adalah mengidentifikasi dan mengkaji berbagai isu, masalah, tantangan dan upaya yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri pada tahun-tahun mendatang (2015-2019). |

***Background Study* Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sub-Bidang Politik Luar Negeri
(Mewujudkan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif Berlandaskan Kepentingan Nasional dan Jati Diri
sebagai Negara Maritim)**

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 352.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.3.DIR.b |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Sub Bidang Politik Luar Negeri. Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Sub Bidang Politik Luar Negeri. Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | <i>Background Study</i> yang mengambil tema “Mewujudkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Berlandaskan Kepentingan Nasional dan Identitas sebagai Negara Maritim” ini dilakukan dengan melakukan kajian dan harmonisasi dari dua sumber utama, yaitu rancangan RPJMN III berdasarkan proses teknokratik pada tahun 2013/2014 serta Visi-Misi dan Agenda Aksi Jokowi-JK 2014 yang diusung oleh pemerintahan baru pada saat Pemilu 2014. |

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 352.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.3.DIR.e |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2012 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Laporan Akhir Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II (2010-2014) Bidang Politik dan Komunikasi Tahun Kedua (2011) . |

Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2013

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 341.48 |
| Kode Klasifikasi DDC | 341.48.EDA.i |
| Penerbit | Eday Prasetyono, Ph.D Riefqi Muna, Ph.D Mahmud Syaltout, Ph.D |
| Pengarang | Eday Prasetyono, Ph.D Riefqi Muna, Ph.D Mahmud Syaltout, Ph.D |
| Tahun Terbit | 2014 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Ide dasar penyusunan indeks ini tidak lain adalah untuk memberikan gambaran dari keamanan hidup manusia Indonesia dilihat dari berbagai aspek, variabel dan indikator, dengan tidak melupakan tujuan keamanan manusia itu sendiri, yaitu (to safeguard the vital core of all human lives from critical pervasive threats, and to do so without impeding long-term human flourishing). |

**Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi (RENAKSI) Strategis Nasional (Stranas)
Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan
dan Kesatuan Bangsa**

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 352.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.3.DIR.k |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | - |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Direktorat Politik dan Komunikasi (Ditpolkom) Bappenas sebagai institusi pemerintah yang tugas pokoknya menyusun perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi, pada tahun 2016 akan menyusun Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. |

Koordinasi Strategis Perencanaan Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 352.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.3.DIR.k |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2012 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Program dan kebijakan pemerintah dibuat dalam lingkup yang luas, dimana perencanaan dan eksekusinya tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, namun melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menggali aspirasi (kondisional). Oleh karena itu koordinasi sangat dibutuhkan agar program dapat terencana dan berjalan dengan baik. Kegiatan koordinasi perencanaan program pembangunan bidang politik dan komunikasi ditujukan untuk membahas dan mendiskusikan berbagai isu, kebijakan dan program-program/kegiatan di bidang politik dan komunikasi antar instansi/lembaga serta unit-unit terkait di Bappenas, sehingga tersusun rencana pembangunan bidang politik dan komunikasi yang sinergis, terpadu, berkelanjutan, serta adanya kesesuaian antara RKP 2013 dengan RKP 2012 dan RPJMN 2010-2014. |

Laporan Akhir Kajian Pembangunan Politik di Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 320 |
| Kode Klasifikasi DDC | 320.DIR.I |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | <p>Kenyataan di Indonesia bahwa selama ini pembangunan lebih difokuskan terhadap sektor ekonomi dan infrastruktur. Hal ini menyebabkan pembangunan dimensi lain yang lebih kualitatif seperti pembangunan sosial, politik, dan lainnya belum diperhatikan. Padahal dewasa ini paradigma pembangunan di dunia sudah lintas disiplin dan multi isu untuk menjawab permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Di Indonesia tidak diakomodasinya perencanaan pembangunan sosial dan politik untuk mengiringi prioritas pembangunan ekonomi dan infrastruktur menyebabkan konflik sumber daya (ekonomi, politik, pendidikan, SARA, dll) secara vertikal maupun horizontal dan melemahnya wibawa pemerintah.</p> |

Laporan Akhir Kajian Penyusunan Indeks Diplomasi Indonesia "Mencari Format Ideal untuk Mengukur Pencapaian Diplomasi Indonesia (Tahap I-2016)"

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 327.2 |
| Kode Klasifikasi DDC | 327.2.KEM.I |
| Penerbit | Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2016 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Kajian ini bertujuan untuk membangun konsep dasar yang dapat digunakan untuk menyusun instrumen yang paling tepat dan representatif untuk mengukur pencapaian diplomasi Indonesia. Instrumen ini diharapkan dapat digunakan secara praktis untuk melakukan evaluasi terhadap strategi, kebijakan, dan program-program yang telah dilaksanakan dalam periode tertentu untuk memastikan bahwa strategi, kebijakan dan program-program yang dirancang memiliki bukti yang memadai untuk membuat sumber daya yang digunakan dapat lebih tepat sasaran dan tepat guna. |

Laporan Akhir Piloting Program Pengembangan *Democracy Trust Fund* di Indonesia "*Piloting Proses Workshop Program Democracy Trust Fund*"

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 321.8 |
| Kode Klasifikasi DDC | 321.8.DIR.I |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2016 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Kajian ini membahas tentang optimalisasi sistem kerja Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam membangun kerangka program berbasis masalah empirik. Instrumen penting kegiatan <i>workshop</i> adalah pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun program berbasis masalah empirik. Menggunakan metode mini <i>workshop</i> sebagai sebuah role model menjadi strategi untuk menghadirkan ruang publik yang dapat mempertemukan berbagai potensi atau sumber daya. Pilihan tersebut sekaligus sebagai metode untuk mengukur kompetensi dan kapabilitas dalam proses melahirkan sebuah output program. |

Laporan Kajian Indeks Keamanan Investasi Indonesia Tahun 2016

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 341.48 |
| Kode Klasifikasi DDC | 341.48.DIR.I |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2016 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan baik atau tidaknya keamanan investasi di Indonesia, tidak hanya stabilitas politik tetapi penegakan hukum, kejelasan regulasi, perijinan ilegal, korupsi yang dilakukan birokrasi, premanisme, perburuhan bahkan sengketa lahan dengan masyarakat setempat sangat mempengaruhi keuntungan netto atas biaya resiko yang akan mempengaruhi para investor untuk menentukan sikap apakah akan berinvestasi di Indonesia dalam jangka pendek atau panjang. |

Laporan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 352.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.3.DIR.I |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | - |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Bappenas setiap tahun bertugas untuk menyusun RKP bersama mitra kerja K/L dan stakeholder lainnya. |

Laporan Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi Strategi Nasional (Stranas) Pemanapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 320.54 |
| Kode Klasifikasi DDC | 320.54.DIR.I |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | - |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Keadaan bangsa dewasa ini yang dihadapkan dengan globalisasi dan tantangan internal memerlukan suatu strategi nasional untuk memperkuat wawasan kebangsaan untuk terus berjuang dalam kompetisi dunia, namun tetap memegang teguh rasa nasionalisme dan budaya Indonesia yang luhur. Oleh karena itu, Bappenas melakukan koordinasi dari tingkat nasional sampai menghimpun ide dan data ke beberapa daerah untuk memaksimalkan dokumen strategi nasional dan membuat program-program yang sesuai di dalam rencana aksi nantinya. Kekayaan budaya Bali dan pelajaran dari Ambon berhasil menambah luas makna wawasan kebangsaan. |

Pengembangan Konsep Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2015

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 341.48 |
| Kode Klasifikasi DDC | 341.48.DIR.p |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | - |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Konsep keamanan manusia mulai berkembang perdebatannya semenjak dipublikasikannya laporan UNDP mengenai pembangunan manusia pada tahun 1994. Perdebatan tentang konsep keamanan manusia berlangsung dalam tiga konteks yang melatarbelakangi munculnya perdebatan mengenai keamanan manusia. |

Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 352.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.3.DIR.p |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2012 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKP 2012 Bidang Politik dan Komunikasi ini diharapkan dapat menjawab sejumlah pertanyaan di atas yaitu pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2012 berdasarkan RKP 2012 yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja K/L yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkumham); Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo); Kementerian Luar Negeri (Kemlu); Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Kesbangpol, Kemdagri); Komisi Pemilihan Umum (KPU); Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). |

Peran Masyarakat Adat dalam Perumusan Kebijakan Publik

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 352.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.3.DIR.p |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2012 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Tidak terbilang tulisan yang menyajikan kekayaan budaya Indonesia yang multi etnis dan multi kultural. Pada satu sisi, multi etnis dan multi kultural merupakan anugerah tiada tara untuk bangsa dan negara ini, namun di lain pihak membutuhkan satu kebijakan yang dapat menghimpun dan mengakomodir keragaman tersebut. Pluralitas masyarakat menyebabkan pembuatan kebijakan menjadi tidak mudah karena harus mengakomodir kepentingan dan kebutuhan yang beragam. Satu dimensi yang belum banyak dibahas adalah persoalan ketersisihan, suatu proses yang muncul dari ketiadaan akses terhadap perumusan kebijakan yang berpengaruh terhadap kepentingan seluruh anggota masyarakat. |

Reviu Implementasi Open Government Indonesia (2011-2014)

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 352.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.3.DIR.r |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas berinisiatif untuk melakukan reviu atas implementasi <i>Open Government</i> Indonesia sebagai upaya untuk melihat dampak atas kebijakan pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 12 Tahun 2008 yang efektif berlaku sejak tahun 2010. |



RINGKASAN KAJIAN

Ringkasan Hasil Kajian/Studi/Penelitian Tahun 2015 Reviu Kelembagaan: Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN 2015

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Wawasan Kebangsaan |
| Kode Kelas DDC | 352.3 |
| Kode Klasifikasi DDC | 352.3.DIR.r |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | - |
| Tipe File | Ringkasan Kajian |
| Deskripsi | Kesiapan Indonesia dalam menghadapi bergulirnya masyarakat ASEAN mulai 31 Desember 2015 sangat dipengaruhi oleh fungsi dan efektivitas kelembagaan yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan menggunakan kerangka pikir perencanaan pembangunan, reviu ini menggali kelembagaan Indonesia dalam menghadapi masyarakat ASEAN. |



KOMUNIKASI

The image features a network diagram on a light beige background. The diagram consists of numerous small, light-colored circular nodes connected by thin, light-colored lines. The nodes are arranged in a somewhat circular pattern, with lines connecting them to form a complex web of triangles and other polygons. The overall appearance is that of a digital or social network. The word "BUKU" is written in a bold, red, sans-serif font in the center of the image.

BUKU

Indeks Kemerdekaan Pers 2016

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 070.4 |
| Kode Klasifikasi DDC | 070.4.ANT.i |
| Penerbit | Dewan Pers |
| Pengarang | Antonio Pradjasto Hardoyo Adi Warsidi dkk |
| Tahun Terbit | 2016 |
| Tipe File | Buku |
| Deskripsi | Dilatarbelakangi keinginan untuk mendapatkan gambaran lebih utuh tentang perkembangan pers Indonesia, sejak sekira lima tahun lalu Dewan Pers bersama komunitas pers mulai menyusun konsep survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) khusus Indonesia. Targetnya, tersedia informasi dan data yang lebih baik tentang perkembangan kemerdekaan pers setiap tahun di seluruh provinsi. Pelaksanaan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia dimulai pada tahun 2015 dan baru menjangkau 13 provinsi. Baru pada 2016 ini, pelaksanaan survei IKP dapat mencakup 24 provinsi. Buku ini memuat laporan lengkap hasil survei IKP tahun 2016, yang mengukur perkembangan kemerdekaan pers sepanjang tahun 2015. Pelaksanaan survei IKP tahun 2016 ini tentunya lebih baik dari pelaksanaan pada tahun 2015. |

Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2017

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 070.4 |
| Kode Klasifikasi DDC | 070.4.ANT.s |
| Penerbit | Dewan Pers |
| Pengarang | Antonio Pradjasto Hardojo Nur Anisah dkk |
| Tahun Terbit | 2017 |
| Tipe File | Buku |
| Deskripsi | Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2017 merupakan hasil riset yang meliputi penelitian sekunder dan lapangan untuk mensurvei kondisi kemerdekaan pers dalam tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk menilai dan memperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi kemerdekaan pers di Indonesia. IKP 2017 menggambarkan situasi pers Indonesia sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2016 di 30 provinsi. Temuan-temuan ini beserta rekomendasi-rekomendasinya diharapkan dapat memberi arahan bagi pengambil kebijakan publik, komunitas media, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan universitas mengenai bagaimana memajukan dan memperkuat kemerdekaan pers; atau mengembangkan pers yang sehat, yang bebas, independen, plurastik, serta profesional. . |



LAPORAN

Kebijakan dan Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Bidang Kominfo Tahun 2004-2009

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 658.401 |
| Kode Klasifikasi DDC | 658.401.KEM.k |
| Penerbit | Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2006 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Bahan Paparan Mengenai Kebijakan dan Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Bidang Kominfo Tahun 2004-2009 yang Disampaikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada Acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2006 pada Tanggal 19 September 2006 di Jakarta. |

Laporan Akhir Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 923,2 |
| Kode Klasifikasi DDC | 923,2.DIR.I |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2017 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk menjadi dokumen pelaporan atas pelaksanaan Kegiatan Pengendalian bersama sembilan Kementerian/Lembaga sebagai mitra Direktorat Politik dan Komunikasi. |

Laporan Kinerja Direktorat Politik dan Komunikasi 2015

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 923,2 |
| Kode Klasifikasi DDC | 923,2.DIR.I |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | LAKIP berisi informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2015, mengacu pada Rencana Strategi (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019. |

Laporan Kinerja Direktorat Politik dan Komunikasi 2016

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 923,2 |
| Kode Klasifikasi DDC | 923,2.DIR.I |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2016 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | LKJ Ditpolkom Tahun 2016 ini berisi informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi selama Tahun Anggaran 2016 dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Politik dan Komunikasi, serta berpedoman pada Rencana Strategi (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019. |

Laporan Kinerja Direktorat Politik dan Komunikasi 2017

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 923,2 |
| Kode Klasifikasi DDC | 923,2.DIR.I |
| Penerbit | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2017 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | LKJ Ditpolkom Tahun 2017 ini berisi informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi selama Tahun Anggaran 2017 dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Politik dan Komunikasi, serta berpedoman pada Rencana Strategi (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019. |

Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode Juli - Agustus 2015

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 659,14 |
| Kode Klasifikasi DDC | 659,14.KOM.h |
| Penerbit | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Pengarang | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Salah satu tugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah melakukan pengawasan agar program televisi makin berkualitas dan berkualitas. Oleh karenanya, KPI perlu data mengenai kualitas program acara televisi. Data itu dipakai sebagai bahan dalam membuat acara berkualitas. Data tersebut diperoleh KPI dengan melakukan penelitian bersama Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 9 Perguruan Tinggi di Indonesia. Laporan ini merupakan pemaparan hasil dari survei yang dilakukan pada periode Juli-Agustus 2015. |

Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Maret - April 2015

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 659,14 |
| Kode Klasifikasi DDC | 659,14.KOM.h |
| Penerbit | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Pengarang | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | <p>Salah satu tugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah melakukan pengawasan agar program televisi makin berkualitas dan berkualitas. Oleh karenanya, KPI perlu data mengenai kualitas program acara televisi. Data itu dipakai sebagai bahan dalam membuat acara berkualitas. Data tersebut diperoleh KPI dengan melakukan penelitian bersama Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 9 Perguruan Tinggi di Indonesia. Laporan ini merupakan pemaparan hasil dari survei yang dilakukan pada periode Maret-April 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah survei, dengan peer review assessment. Responden dari survei ini adalah para pemirsa ahli yang dipandang mengetahui mengenai program siaran televisi dan bisa menilai program siaran televisi.</p> |

Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Mei - Juni 2015

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 659,14 |
| Kode Klasifikasi DDC | 659,14.KOM.h |
| Penerbit | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Pengarang | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Salah satu tugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah melakukan pengawasan agar program televisi makin berkualitas dan berkualitas. Oleh karenanya, KPI perlu data mengenai kualitas program acara televisi. Data itu dipakai sebagai bahan dalam membuat acara berkualitas. Data tersebut diperoleh KPI dengan melakukan penelitian bersama Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 9 Perguruan Tinggi di Indonesia. Laporan ini merupakan pemaparan hasil dari survei yang dilakukan pada periode Mei-Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah survei, dengan peer review assessment. Responden dari survei ini adalah para pemirsa ahli yang dipandang mengetahui mengenai program siaran televisi dan bisa menilai program siaran televisi. |

Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 1 Tahun 2016

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 659,14 |
| Kode Klasifikasi DDC | 659,14.KOM.h |
| Penerbit | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Pengarang | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Tahun Terbit | 2016 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Laporan ini merupakan hasil kerjasama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 12 Perguruan Tinggi di Indonesia yang memaparkan hasil dari survei yang dilakukan pada periode 1 Tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun rating kualitas program siaran televisi berdasarkan kategori program siaran secara periodik dan mengevaluasi kualitas program acara televisi berdasarkan kategori program siaran secara periodik. Untuk tujuan penelitian pertama yaitu menyusun rating kualitas program acara TV melibatkan 1200 responden di 12 kota, sedangkan untuk tujuan penelitian mengevaluasi kualitas program siaran TV melibatkan 120 panel ahli. |

Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 3 Tahun 2016

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 659,14 |
| Kode Klasifikasi DDC | 659,14.KOM.h |
| Penerbit | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Pengarang | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Tahun Terbit | 2016 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Laporan ini merupakan hasil kerjasama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 12 Perguruan Tinggi di Indonesia yang memaparkan hasil dari survei yang dilakukan pada periode 3 Tahun 2016 yang melibatkan 119 pemirsa ahli di 12 Kota. |

Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 4 Tahun 2016

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 659,14 |
| Kode Klasifikasi DDC | 659,14.KOM.h |
| Penerbit | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Pengarang | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Tahun Terbit | 2016 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu data “rating” sendiri sesuai dengan misi, fungsi dan tugas KPI. Sehingga KPI bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 12 Perguruan Tinggi di Indonesia untuk melakukan penelitian yang bersifat evaluasi terhadap kualitas isi program siaran televisi yang dilakukan oleh pemirsa ahli. Laporan ini memaparkan hasil dari survei yang dilakukan pada periode 4 Tahun 2016 yang melibatkan 120 pemirsa ahli di 12 Kota. |

Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 5 Tahun 2016

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 659,14 |
| Kode Klasifikasi DDC | 659,14.KOM.h |
| Penerbit | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Pengarang | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Tahun Terbit | 2016 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu data “rating” sendiri sesuai dengan misi, fungsi dan tugas KPI. Sehingga KPI bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 12 Perguruan Tinggi di Indonesia untuk melakukan penelitian yang bersifat evaluasi terhadap kualitas isi program siaran televisi yang dilakukan oleh pemirsa ahli. Laporan ini memaparkan hasil dari survei yang dilakukan pada periode 5 Tahun 2016. |

Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode I Januari - Maret Tahun 2018

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 659,14 |
| Kode Klasifikasi DDC | 659,14.KOM.h |
| Penerbit | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Pengarang | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | <p>Tahun 2018 pelaksanaan Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memasuki tahun ke-4 (empat). Survei ini penting dilakukan secara periodik karena salah satu fungsi KPI adalah melakukan pengawasan agar program televisi makin baik dan berkualitas. Pada tahun ini, KPI melaksanakan survei sebanyak 3 (tiga) kali. Laporan ini merupakan pemaparan hasil dari survei yang dilakukan pada periode pertama (Januari-Maret). Pelaksanaan survei ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas program siaran televisi berdasarkan kategori program siaran secara periodik; mengevaluasi kualitas program siaran televisi berdasarkan lembaga penyiaran; dan menyusun pemeringkatan kualitas program siaran televisi berdasarkan kategori program siaran secara periodik.</p> |

Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode II April - Juni Tahun 2018

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 659,14 |
| Kode Klasifikasi DDC | 659,14.KOM.h |
| Penerbit | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Pengarang | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Tahun Terbit | 2018 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | <p>Tahun 2018 pelaksanaan Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memasuki tahun ke-4 (empat). Survei ini penting dilakukan secara periodik karena salah satu fungsi KPI adalah melakukan pengawasan agar program televisi makin baik dan berkualitas. Pada tahun ini, KPI melaksanakan survei sebanyak 3 (tiga) kali. Laporan ini merupakan pemaparan hasil dari survei yang dilakukan pada periode kedua (April-Juni). Pelaksanaan survei ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas program siaran televisi berdasarkan kategori program siaran secara periodik; mengevaluasi kualitas program siaran televisi berdasarkan lembaga penyiaran; dan menyusun pemeringkatan kualitas program siaran televisi berdasarkan kategori program siaran secara periodik.</p> |

Hasil Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode September - Oktober 2015

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 659,14 |
| Kode Klasifikasi DDC | 659,14.KOM.h |
| Penerbit | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Pengarang | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membutuhkan data mengenai kualitas program acara televisi untuk melakukan pengawasan agar program televisi makin berkualitas dan berkualitas. Data kualitas program siaran ini tidak dimaksudkan untuk mengukur kuantitas (berapa jumlah penonton) tetapi bagaimana kualitas program siaran. Data tersebut diperoleh KPI dengan melakukan penelitian bersama Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 9 Perguruan Tinggi di Indonesia. Laporan ini merupakan pemaparan hasil dari survei yang dilakukan pada periode September-Oktober 2015. |

Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2016

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 659,14 |
| Kode Klasifikasi DDC | 659,14.KOM.s |
| Penerbit | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Pengarang | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Tahun Terbit | 2016 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Laporan ini merupakan hasil kerjasama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 12 Perguruan Tinggi di Indonesia yang memaparkan hasil dari survei yang dilakukan pada periode 2 Tahun 2016 (Mei-Juni). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kualitas program siaran televisi berdasarkan kategori program siaran secara periodik, dan menyusun pemeringkatan kualitas program siaran televisi berdasarkan kategori program siaran secara periodik. |

Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode November - Desember 2015

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 659,14 |
| Kode Klasifikasi DDC | 659,14.KOM.s |
| Penerbit | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Pengarang | Komisi Penyiaran Indonesia |
| Tahun Terbit | 2015 |
| Tipe File | Laporan |
| Deskripsi | Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membutuhkan data mengenai kualitas program acara televisi untuk melakukan pengawasan agar program televisi makin berkualitas dan berkualitas. Data kualitas program siaran ini tidak dimaksudkan untuk mengukur kuantitas (berapa jumlah penonton) tetapi bagaimana kualitas program siaran. Data tersebut diperoleh KPI dengan melakukan penelitian bersama Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 9 Perguruan Tinggi di Indonesia. Laporan ini merupakan pemaparan hasil dari survei yang dilakukan pada periode November-Desember 2015. |

A network diagram consisting of numerous small, light-colored circular nodes connected by thin, light-colored lines. The nodes are arranged in a somewhat circular pattern, with lines connecting them to form a complex web of triangles and other polygons. The background is a light beige color with rounded corners, set against a dark red background.

NASKAH

Acara 100 Tahun Peringatan Kebangkitan Nasional Tahun 2008, di Istana Negara Jakarta, 20 Mei 2008

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .BIR.a |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Acara 100 Tahun Peringatan Kebangkitan Nasional Tahun 2008 Tanggal 20 Mei 2008 di Istana Merdeka, Jakarta. |

Acara Laporan Menteri Keuangan dan Sidang Kabinet Terbatas Bidang Keuangan di Departemen Keuangan

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 070.4 |
| Kode Klasifikasi DDC | 070.4 .BIR.a |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Keterangan Pers dari Pidato Presiden Republik Indonesia pada Acara Laporan Menteri Keuangan dan Sidang Kabinet Terbatas Bidang Keuangan Tanggal 21 Februari 2008 di Departemen Keuangan Republik Indonesia. |

Deklarasi "Indonesia Bisa", Tanggal 20 Mei 2008 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .BIR.d |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Deklarasi "Indonesia Bisa" oleh Presiden Republik Indonesia pada Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional Tanggal 20 Mei 2008 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. |

Foreign Policy Breakfast, di Gedung Pancasila, Deplu, Jakarta, 19 Agustus 2008

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .BIR.f |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Acara <i>Foreign Policy Breakfast</i> Tanggal 19 Agustus 2008 di Gedung Pancasila, Departemen Luar Negeri, Jakarta. |

Kebangkitan Indonesia Baru

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .KEM.k |
| Penerbit | Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2007 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dengan Tema "Kebangkitan Indonesia Baru" pada Seminar Sehari Dalam Rangka Memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2007 pada Tanggal 12 Juni 2007 di Universitas Indonesia, Depok. |

Kepemimpinan yang Baik dalam Era Demokrasi

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .KEM.k |
| Penerbit | Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2006 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dengan Tema "Kepemimpinan yang Baik dalam Era Demokrasi" pada Acara Diskusi "Mencari Pemimpin yang Dapat Diteladani" Tanggal 31 Juli 2006 di Jakarta. |

Ket. Pers Presiden Menyangkut Ms. Kaban dan Paskah Suzetta, di Kantor Presiden, 4 Agustus 2008

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 070.4 |
| Kode Klasifikasi DDC | 070.4 .BIR.k |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Keterangan Pers dari Pidato Presiden Republik Indonesia menyangkut Bapak Ms. Kaban (Menteri Kehutanan) dan Bapak Paskah Suzetta (Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/KA. Bappenas) Tanggal 4 Agustus 2008 di Kantor Presiden Republik Indonesia, Jakarta. |

Keterangan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah di Depan Sidang Paripurna DPD

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .-.k |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | - |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Pidato Presiden Republik Indonesia sebagai Keterangan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah di Depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tanggal 22 Agustus 2008 di Jakarta. |

Keterangan Pers Presiden Mengenai Kecaman Tindakan Kekerasan, 2 Juni 2008

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 070.4 |
| Kode Klasifikasi DDC | 070.4 .BIR.k |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Keterangan Pers dari Pidato Presiden Republik Indonesia mengenai kecaman terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu organisasi tertentu Tanggal 2 Juni 2008 di Kantor Presiden Republik Indonesia, Jakarta. |

Keterangan Pers Presiden RI Berkenaan dengan Kenaikan Gas LPG dan Pemilu, 3 September 2008

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 070.4 |
| Kode Klasifikasi DDC | 070.4 .BIR.k |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Keterangan Pers dari Pidato Presiden Republik Indonesia berkenaan dengan Kenaikan Gas LPG dan Pemilihan Umum Tanggal 3 September 2008 di Kantor Presiden Republik Indonesia. |

Keterangan Pers Presiden RI Mengenai Krisis Keuangan Global, di Kantor Presiden, 9 Oktober 2008

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 070.4 |
| Kode Klasifikasi DDC | 070.4 .BIR.k |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Keterangan Pers dari Pidato Presiden Republik Indonesia berkenaan dengan Krisis Keuangan Global Tanggal 9 Oktober 2008 di Kantor Presiden Republik Indonesia. |

Keterangan Pers Presiden RI pada Kunjungan Perdana Menteri Timor Leste, di Jakarta, 29 April 2008

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 070.4 |
| Kode Klasifikasi DDC | 070.4 .BIR.k |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Keterangan Pers dari Sambutan Presiden Republik Indonesia atas Kunjungan Perdana Menteri Timor Leste Tanggal 29 April 2008 di Istana Merdeka, Jakarta. |

Keynote Adress By President Susilo Bambang Yudhoyono, President of The Republic of Indonesia at The Opening of The 116th Assembly of The Inter-parliamentary Union (IPU)

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .SEK.k |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Sekretariat Negara RI |
| Tahun Terbit | 2007 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Pidato Utama Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Acara The <i>116th Assembly of The Inter-parliamentary Union (IPU)</i> Tanggal 29 April 2007 di Bali. |

Keynote Speech Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan *Regional High-level Consultation on UN System-wide Coherence*

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .SEK.k |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Sekretariat Negara RI |
| Tahun Terbit | - |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Pidato Utama Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Acara <i>Regional High-level Consultation on UN System-wide Coherence</i> . |

Konsolidasi Demokrasi untuk Kemakmuran Rakyat

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .KEM.k |
| Penerbit | Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2006 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dengan Tema "Konsolidasi Demokrasi untuk Kemakmuran Rakyat" pada Seminar Demokrasi untuk Kemakmuran Rakyat Tanggal 11 April 2006 di Jakarta. |

Malam Penghargaan Achmad Bakrie, di Hotel Nikko, Jakarta, 14 Agustus 2008

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .BIR.m |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Acara Malam Penghargaan Achmadd Bakrie Tanggal 14 Agustus 2008 di Hotel Nikko, Jakarta. |

Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .SEK.m |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Sekretariat Negara RI |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Presiden Republik Indonesia dengan Tema "Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila" Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila Tanggal 1 Juni 2006 di Jakarta Convention Center. |

Paparan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas pada Rapat Koordinasi Nasional Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2006, Jakarta, 19 September 2006

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .KEM.p |
| Penerbit | Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2006 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Paparan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas pada Rapat Koordinasi Nasional Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2006 pada Tanggal 16 September 2007 di Jakarta. |

Pembangunan Perdamaian Indonesia

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .KEM.p |
| Penerbit | Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2007 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dengan Tema "Pembangunan Perdamaian Indonesia" pada Forum Kebangkitan Nasional untuk Indonesia Damai Tanggal 21 Mei 2007 di Maluku. |

Pembukaan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2008, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 4-08-08

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .BIR.p |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Tahun 2008 Tanggal 4 Agustus 2008 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. |

Pengarahan Presiden Republik Indonesia pada Acara Pembukaan Rapat Terbatas dalam Mempersiapkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mendatang di Kantor Presiden

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .BIR.p |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | - |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Pidato Pengarahan Presiden Republik Indonesia pada Acara Pembukaan Rapat Terbatas dalam Mempersiapkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mendatang di Kantor Presiden Republik Indonesia. |

Pengumuman Reshuffle Kabinet Terbatas (Transkripsi Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia Mengenai Pengumuman Reshuffle Kabinet Terbatas Istana Merdeka, 7 Mei 2007)

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 070.4 |
| Kode Klasifikasi DDC | 070.4 .BIR.p |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Pers dan Media |
| Tahun Terbit | 2007 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Transkripsi Keterangan Pers dari Pidato Presiden Republik Indonesia Mengenai Pengumuman Reshuffle Kabinet Terbatas Tanggal 7 Mei 2007 di Istana Merdeka, Jakarta. |

Peresmian Pembukaan Konvensi Hukum di Istana Negara Tanggal 15 April 2008

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .BIR.p |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Acara Peresmian Pembukaan Konvensi Hukum Nasional tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional Tanggal 15 April 2008 di Istana Negara, Jakarta. |

Peresmian Pembukaan Mukhtamar Besar Al Khairaat IX, di Pondok Pesantren Al Khairaat, Sulawesi Tengah, 26-08-08

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .BIR.p |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Acara Peresmian Pembukaan Mukhtamar Besar Al Khairaat IX Tanggal 26 Agustus 2008 di Pondok Pesantren Al Khairaat, Sulawesi Tengah. |

Peringatan Hari Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Ke-63, 29 Agustus 2008, di Gedung MPR, Jakarta

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .BIR.p |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Acara Peringatan Hari Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Ke-63 Tanggal 29 Agustus 2008 di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta. |

Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta Keterangan Pemerintah Beserta Nota Keuangannya

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .SEK.p |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Sekretariat Negara RI |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Beserta Nota Keuangannya Tanggal 15 Agustus 2008 di Depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta. |

Politik dan Pembangunan secara Menyeluruh

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .KEM.p |
| Penerbit | Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2006 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Makalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dengan Tema "Politik dan Pembangunan Politik secara Menyeluruh" pada Lokakarya Pembangunan Gerbang Sepadu Tanggal 29 November 2006 di Balikpapan. |

Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke-13 Tahun 2008, di Istana Negara, 8 Agustus 2008

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .BIR.p |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Acara Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke-13 Tahun 2008 dan Peresmian Pembukaan Research Innovation and Technology Expo 2008 Tanggal 8 Agustus 2008 di Istana Negara, Jakarta. |

Sambutan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas pada Acara Dialog Ilmiah Manajemen X "Potensi Aceh Pasca Pengesahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh"

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .KEM.s |
| Penerbit | Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2006 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas pada Acara Dialog Ilmiah Manajemen X "Potensi Aceh Pasca Pengesahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh" Tanggal 22 November 2006 di Banda Aceh. |

Sambutan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas pada Acara Temu Muka dan Diskusi "Peran Kekayaan dalam Masyarakat dalam Membantu Pembangunan Bangsa dan Negara"

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .KEM.s |
| Penerbit | Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2006 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas pada Acara Temu Muka dan Diskusi "Peran Kekayaan dalam Masyarakat dalam Membantu Pembangunan Bangsa dan Negara" Tahun 2006 di Jakarta. |

Sambutan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas pada Penandatanganan MoU dan Diskusi Panel *Deepening Democracy* in Indonesia, Jakarta, 2 Maret 2006

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .KEM.s |
| Penerbit | Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2006 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas pada Penandatanganan MoU dan Diskusi Panel <i>Deepening Democracy</i> in Indonesia Tanggal 2 Maret 2006 di Jakarta. |

Sambutan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemuda Katolik dengan Tema "Penguatan Demokrasi dalam Kesejahteraan Rakyat Melalui Pemilu 2009", Merauke, 13 Februari 2007

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .KEM.s |
| Penerbit | Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2007 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemuda Katolik dengan Tema "Penguatan Demokrasi dalam Kesejahteraan Rakyat Melalui Pemilu 2009" Tanggal 13 Februari 2007 di Merauke. |

Sambutan Pembukaan Musrembangnas 2009, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2009

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .SEK.s |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Sekretariat Negara RI |
| Tahun Terbit | 2009 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Transkripsi Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tanggal 12 Mei 2009 di Hotel Bidakara, Jakarta. |

Sambutan Pertemuan dengan Peserta Konferensi Ke-5 Perkumpulan Goangdong Sedunia

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .SEK.s |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Sekretariat Negara RI |
| Tahun Terbit | 2009 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Acara Pertemuan dengan Peserta Konferensi Ke-5 Federasi Perkumpulan Goangdong Sedunia Tahun 2009 pada Tanggal 24 Mei 2009 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. |

Speech by The President of The Republic of Indonesia on Government Leaders Forum, May 9th, 2008

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .BIR.s |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Pidato Presiden Republik Indonesia pada Acara <i>Government Leaders Forum</i> Tanggal 9 Mei 2008 di Hotel Shangri-La, Jakarta. |

Stabilitas Politik dalam Era Demokratisasi sebagai Prasyarat Iklim Investasi yang Kondusif

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .KEM.s |
| Penerbit | Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2006 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Makalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dengan Tema "Stabilitas Politik dalam Era Demokratisasi sebagai Prasyarat Iklim Investasi yang Kondusif" pada Seminar Nasional Strategi Inovasi Kebijakan dalam Meningkatkan Investasi di Daerah Tanggal 30 November 2006 di Bandung. |

State Adress of The President of The Republic of Indonesia and The Government Statement

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .SEK.s |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Sekretariat Negara RI |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan Pernyataan Pemerintah Indonesia Terkait Draf Pendapatan dan Pengeluaran Negara (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk Tahun Anggaran 2009 Beserta Nota Keuangannya pada Tanggal 15 Agustus 2008 di Depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta. |

Strategi Nasional Mewujudkan Perdamaian dan Harmonisasi Nasional di Indonesia

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .KEM.s |
| Penerbit | Kementerian PPN/Bappenas |
| Pengarang | Kementerian PPN/Bappenas |
| Tahun Terbit | 2006 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Makalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dengan Tema "Strategi Nasional Mewujudkan Perdamaian dan Harmonisasi Nasional di Indonesia" pada <i>The First International Conference on Mathematics and Statistics (ICoMS-1)</i> Tanggal 19-21 Juni 2006 di Bandung. |

Teleconference dengan Masyarakat yang Berada di Pulau-Pulau Terpencil dan Terdepan, 16 Agustus 2008

| | |
|-----------------------------|---|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .BIR.t |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Biro Naskah dan Penerjemahan |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Naskah Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Acara <i>Teleconference</i> dengan Masyarakat yang Berada di Pulau-Pulau Terpencil dan Terdepan pada Tanggal 16 Agustus 2008 di Wisma Negara, Jakarta. |

The Government Statement on The Regional Development Policy, 22 August 2008

| | |
|-----------------------------|--|
| Sektor | Politik dan Komunikasi |
| Sub-Sektor | Komunikasi |
| Kode Kelas DDC | 091 |
| Kode Klasifikasi DDC | 091 .SEK.t |
| Penerbit | Sekretariat Negara RI |
| Pengarang | Sekretariat Negara RI |
| Tahun Terbit | 2008 |
| Tipe File | Naskah |
| Deskripsi | Pernyataan Pemerintah Terkait Kebijakan Pembangunan Daerah pada Tanggal 22 Agustus 2008 di Depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Jakarta. |

